

## PERAN KOMUNIKASI PEMERINTAH ACEH TIMUR MEMPERKENALKAN DESTINASI WISATA HALAL

Samsuar<sup>1</sup>; Muhammad Mukhlis<sup>2</sup>; Sirajul Maulana<sup>3</sup>

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa<sup>1,2</sup>; Dinas Komunikasi dan Informasi  
Aceh Timur<sup>3</sup>

E-mail: [samsuar@iainlangsa.ac.id](mailto:samsuar@iainlangsa.ac.id)<sup>1</sup>; [mukhlis.kpi@iainlangsa.ac.id](mailto:mukhlis.kpi@iainlangsa.ac.id)<sup>2</sup>;  
[rajulmaulana21@gmail.com](mailto:rajulmaulana21@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Artikel ini mengkaji bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Aceh Timur memberikan pemahaman serta membujuk masyarakat di sekitar destinasi wisata terkait konsep wisata halal yang disodorkan pemerintah, penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme serta pendekatan kualitatif, teknik *maximum variation* dipergunakan dalam pengumpulan data, pertimbangan keluasan dan keragaman elemen masyarakat yang terlibat dalam masalah ini menjadi faktor penentu, data yang terkumpul diiris menggunakan pisau teori Inovasi dari Gabriel Tarde. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh Timur menggunakan berbagai saluran komunikasi yang dimiliki termasuk dengan pendekatan secara interpersonal terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan agama memberikan dampak pada pelaksanaan program wisata halal di Aceh Timur.

**Kata kunci:** Peran Komunikasi, Aceh Timur, Wisata Halal.

### Abstract

*This article researches the East Aceh regency government's effort to give the concept and persuade society around tourism destination places related to the halal tourism concept raised by the government. This research uses a constructive paradigm and also a qualitative approach. Maximum variation technique is used in collecting data, consideration of large area and diversity of people to be involved; all of these are the key factor in this case. Data collection is sliced using the Diffusion Theory cutter by Gabriel Tarde. The result of this research shows that many communication available ways are used in making an effort by the East Aceh government, including by making an interpersonal approach with the informal leader and leading religious figures give impact toward implementing halal tourism in East Aceh regency.*

**Keywords:** *Communication Role, East Aceh, Halal Tourism.*

## PENDAHULUAN

Sekelompok massa datang dengan menumpang truk bak terbuka dan sepeda motor ke kawasan Pantai Leuge, hari itu pantai ini dipadati pengunjung yang ingin

menikmati keindahan pantai yang terletak di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Dengan menggunakan alat pengeras suara massa yang merupakan santri dari berbagai pesantren di sekitar Peureulak itu menghalau para pengunjung pantai wisata untuk pulang, mereka menutup pantai itu karena takut para pengunjung pantai akan berbuat tindakan yang melanggar syariat Islam.<sup>1</sup>

Fenomena penutupan pantai atas nama agama ini yang merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Aceh Timur ini merupakan insiden buruk terhadap perkembangan pariwisata di daerah ini. Padahal sektor pariwisata merupakan salah satu ladang devisa bagi pemerintah daerah, potensi sektor ini sangat menjanjikan karena pariwisata juga merupakan sektor yang tahan terhadap krisis global, bahkan saat ini pariwisata telah menjadi industri tersendiri yang besar dan dipandang sebagai sektor yang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Implikasi dari maraknya industri pariwisata yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, bukan hanya meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, namun juga dapat mampu memutar perekonomian masyarakat di sekitar destinasi wisata.<sup>2</sup>

Potensi inilah yang dilirik oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebuah daerah yang berada di pesisir timur provinsi Aceh guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membangkitkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat pesisir pantai dan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat ibukota kabupaten yang umumnya hidup dibawah garis sejahtera.<sup>3</sup> Sebagai daerah yang memiliki potensi destinasi wisata mulai dari wisata bahari, wisata ziarah sampai wisata cagar alam, harapan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terhadap kemajuan pariwisata demikian besar, kondisi ini menuntut pemerintah bekerja keras menata infrastruktur lokasi tujuan serta memberdayakan masyarakat agar mampu menjadi tuan rumah yang ramah serta baik bagi para wisatawan.

---

<sup>1</sup> Antara Aceh, "Ratusan Santri Bubarkan Pengunjung Pantai Di Aceh Timur," 2019, <https://aceh.antaraneews.com/berita/89314/ratusan-santri-bubarkan-pengunjung-pantai-di-aceh-timur>.

<sup>2</sup> Oraphan Chanin et al., "Guidelines on Halal Tourism Management in the Andaman Sea Coast of Thailand," *Journal of Economics, Business and Management* 3, no. 8 (2015): 791–94, <https://doi.org/10.7763/JOEBM.2015.V3.287>.

<sup>3</sup> BPS Kabupaten Aceh Timur, *Kabupaten Aceh Timur Dalam Angka 2020*, 1st ed. (Adeh Timur: BPS Aceh Timur, 2020).

Peran pemerintah daerah (pemda) seperti yang disampaikan Diah Lastri<sup>4</sup>, dan Huda<sup>5</sup>, bahwa pemda harus memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan sebuah rencana pembangunan, karena stimulus yang diberikan oleh pemerintah dalam berbagai bentuk akan memberikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam partisipasi pembangunan.

Guna mewujudkan destinasi wisata yang aman dan nyaman bagi para wisatawan ini, diperlukan peran pemerintah serta sokongan publik yang sejalan. Pemerintah serta warga dilibatkan supaya proses pemasaran serta pengenalan keunggulan produk dapat berjalan dengan efisien serta efektif.<sup>6</sup> Pemerintahan yang baik (good governance) pastinya mengaitkan kemitraan (partnership) antara pemerintah serta masyarakatnya dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>7</sup>

Namun rencana Pemerintah kabupaten Aceh Timur ini mendapat pertentangan dari masyarakat terutama tokoh agama serta pimpinan dayah yang ada di sekitar destinasi wisata, mereka menilai keberadaan destinasi wisata justru membawa bencana dengan alasan syariat Islam, destinasi wisata disamakan sebagai tempat maksiat, pasalnya mereka menganggap destinasi wisata terutama pantai tidak ada pemisahan antara pengunjung lelaki dan perempuan sehingga rawan terjadi perbuatan yang melanggar syariat Islam.<sup>8</sup> Penolakan tersebut meluas dalam bentuk demo-demo serta pengusiran para wisatawan yang datang ke pantai.

Pertentangan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Aceh Timur, pada satu sisi potensi wisata yang dimiliki harus dikelola dengan baik sehingga menghasilkan PAD dan efek domino ekonomi bagi masyarakat setempat, pada sisi

---

<sup>4</sup> Diah Lastri Febriani and Reni Juliani, "Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Informasi Publik Di Kabupaten Aceh Barat," *AT-TANZIR: JURNAL ILMIAH PRODI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM*, June 29, 2022, 19–38, <https://doi.org/10.47498/tanzir.v13i1.970>.

<sup>5</sup> Miftahul Huda, Muhammad Ulin Nuha, and Dewi Mashfufah, "Komunikasi Dakwah Kolaboratif Pemerintah Desa Melalui Kebijakan Publik," *AT-TANZIR: JURNAL ILMIAH PRODI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM*, July 26, 2021, 37, <https://doi.org/10.47498/tanzir.v12i1.521>.

<sup>6</sup> Gandes Dwi Ayuwangi, "Analisis Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kotawaringin Timur Dalam Upaya Menjadikan Sampit Sebagai Kota Tujuan Pariwisata 2016-2021," January 2019.

<sup>7</sup> M Wafah, *Redevelopment Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Drajat Lamongan Dengan Pendekatan Semiotika Tema Sapta Paweling* (digilib.uinsby.ac.id, 2019), <http://digilib.uinsby.ac.id/33252/>.

<sup>8</sup> Media Realitas, "Ratusan Santri Demo Sejumlah Pantai Wisata Di Aceh Timur," 2019, <https://mediarealitas.com/2019/07/ratusan-santri-demo-sejumlah-pantai-wisata-di-aceh-timur/>.

yang lain bagaimana mengelola potensi wisata ini yang ramah dengan budaya lokal dan sesuai dengan syariat Islam, apalagi sejumlah destinasi wisata merupakan kawasan pantai utama seperti Pantai Kuala Leuge dan pantai Kuala Beukah di Kecamatan Peureulak serta pantai Keutapang Mameh, di Kecamatan Idi Rayeuk.

Tulisan terkait dengan peran pemerintah mendorong kemajuan destinasi wisata di daerah telah banyak diulas oleh para peneliti, seperti Azda,<sup>9</sup> Kuswandi,<sup>10</sup> dan Makkasau et al.<sup>11</sup>, serta pada kajian Rachmawati.<sup>12</sup> Namun sisi peran yang dimainkan pemerintah kabupaten Aceh Timur berbeda dalam tulisan ini, sehingga memiliki novelty serta keunikan tersendiri, peran komunikasi melalui berbagai saluran yang dimainkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk memperkenalkan destinasi wisata yang sesuai dengan syariat Islam sehingga bisa diterima masyarakat terutama oleh para pemuka agama di sekitar destinasi wisata yang umumnya merupakan wilayah pantai merupakan hal yang sangat jarang dilirik para peneliti sebelumnya.

## LANDASAN TEORI

Riset ini memakai Teori Difusi yang diajukan Gabriel Tarde, dalam gagasannya ini Gabriel memperkenalkan kepada publik Kurva Difusi berupa S (S-shaped Diffusion Curve).<sup>13</sup> Kurva ini menerangkan kalau sesuatu inovasi dicoba oleh seorang dicermati lewat ukuran waktu. Dalam kurva tersebut ada 2 buah sumbu; yaitu sumbu yang menerangkan tingkatan adopsi serta sumbu yang menerangkan ukuran waktu. Sementara itu Rogers mendefinisikan difusi inovasi merupakan proses sosial yang mengkomunikasikan data tentang ilham baru yang

---

<sup>9</sup> M A Azda, *Strategi Pemerintah Desa Pongkar Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun ...* (repository.uin-suska.ac.id, 2020), <http://repository.uin-suska.ac.id/29147/>.

<sup>10</sup> Kuswandi., "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Pariwisata Di Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 8, No. 2 (December 21, 2020): 90–113,.

<sup>11</sup> Nurdalwah Makkasau et al., "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Camba-Cambang Kabupaten Pangkep," *UNM Geographic Journal* 3, no. 2 (August 2021): 167–74, <https://doi.org/10.26858/UGJ.V3I2.22852>.

<sup>12</sup> Anna Rachmawati, "Upaya India Untuk Menjadi Tujuan Pariwisata Medis Di Kawasan Asia Selatan Pada Pemerintahan Presiden Pranab Mukherjee (2012-2017)," 2020.

<sup>13</sup> Jussi Kinnunen, "Gabriel Tarde as a Founding Father of Innovation Diffusion Research," *Acta Sociologica* 39, no. 4 (1996): 431–42.

ditatap secara subjektif. Arti inovasi dengan demikian lambat- laun dibesarkan lewat suatu proses konstruksi sosial.

Teori difusi inovasi pada esensinya menjelaskan bagaimana suatu gagasan serta ilham baru yang dikomunikasikan pada suatu kultur ataupun kebudayaan. Kalau teori ini berfokus pada bagaimana suatu gagasan ataupun ilham baru bisa serta dimungkinkan diadopsi oleh suatu kelompok sosial maupun kebudayaan tertentu.

a. Konsep Teori Difusi Inovasi

Tujuan utama dari difusi inovasi adalah diadopsinya suatu inovasi berupa gagasan, ilmu pengetahuan serta teknologi baik oleh orang ataupun kelompok sosial tertentu. Oleh karenanya Rogers mengemukakan kalau ada 4 ciri inovasi yang yang bisa pengaruhi tingkatan adopsi dari orang ataupun kelompok sosial tertentu.

b. Keuntungan Relatif (Relative Advantage)

Keuntungan relatif merupakan gimana sesuatu inovasi yang baru ini bisa dikatakan lebih baik dari inovasi lebih dahulu ataupun malah tidak lebih baik dari inovasi lebih dahulu. Tolak ukuranya merupakan gimana seseorang adopter merasakan langsung akibat dari inovasi tersebut yang menjadikanya puas maupun tidak puas pada suatu inovasi. Terus menjadi besar keuntungan relatif yang dialami oleh adopter hendak menjadikan inovasi tersebut terus menjadi diadopsi oleh suatu kelompok.

c. Kesesuaian (Compatibility)

Kesesuaian berkaitan dengan gimana sesuatu inovasi itu bisa dikatakan cocok dengan keadaan warga, kebudayaan serta nilai- nilai dalam warga tersebut, dan pasti saja apakah cocok dengan kebutuhan yang terdapat. Bila cocok dengan apa yang disebutkan maka sesuatu inovasi itu hendak gampang diadopsi bilamana tidak hingga kebalikannya hendak susah diadopsi.

d. Kerumitan (Complexity)

Persoalan kesulitan ini berkaitan dengan seberapa rumit sesuatu inovasi bisa dimengerti serta dijalankan oleh adopter. Terus menjadi rumit pasti saja hendak terus menjadi susah buat diadopsi begitu pula sebaliknya terus menjadi gampang dimengerti hingga inovasi tersebut hendak terus menjadi gampang buat diadopsi.

e. Bisa diuji coba (Triability)

Sesuatu inovasi hendak lebih gampang diadopsi bila sebuah inovasi itu bisa di uji cobakan dalam keadaan sesungguhnya. Kalau sesuatu inovasi tersebut, cocok ataupun tidaknya bisa lekas dikenal manakala bisa dilihat lewat sesuatu uji coba. Dengan uji coba para adopter bisa mengenali kelebihan serta kekurangan dari inovasi tersebut saat sebelum diadopsi seluruhnya

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme serta pendekatan kualitatif,<sup>14</sup> sebagai acuan untuk melihat konstruksi realitas dari interaksi yang terbangun antara pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebagai operator utama dalam peran komunikasi bersama masyarakat serta para tokoh masyarakat di sekitar lokasi destinasi wisata terkait wisata halal pergulatan interaksi yang terjadi.

Dengan mempertimbangkan keluasan dan keragaman informan yang terkait dalam pembahasan penelitian ini merupakan titik kunci untuk menjawab persoalan mendasar dalam penelitian ini sehingga memilih teknik *maximum variation* untuk mengumpulkan data lapangan.<sup>15</sup> Data dianalisis dengan alur kerja yang disarankan oleh Miles dan Huberman yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penyajian kesimpulan.<sup>16</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berbicara tentang konsep wisata halal tidak hanya berkaitan dengan destinasi situs-situs keagamaan semata atau makam para tokoh agama ataupun tempat-tempat yang identik dengan budaya Islam seperti tempat ibadah semata dengan persoalan makanan semata, namun konsep ini dapat diperkenalkan lebih jauh lagi, konsep wisata halal mencakup berbagai proses yang terkait dengan Pariwisata mulai dari bahan-bahan baku yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata, dikonsumsi dipastikan kehalalannya, juga persoalan *hospitality* kepada

---

<sup>14</sup> John W Creswell, Daliborka Luketić Sveučilište U Zadru, and Odjel Za Pedagogiju, "Research Desing: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (3 Rd Edition) (Nacrt Istraživanja: Kvalitativni, Kvantitativni i Mješoviti Pristupi)," n.d.

<sup>15</sup> Pawito., *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, II (2018) (Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), 2007),

<sup>16</sup> Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Sage publications, 2018).

para tamu beserta seluruh elemen yang terlibat dalam industri pariwisata hingga perilaku seluruh unsur dalam masyarakat.

Persoalan ini tidak bisa dianggap selesai dengan hanya mengandalkan bahwa daerah dan masyarakat Aceh sudah melaksanakan syariat Islam sehingga identik dengan kehidupan yang Islami. Namun terkait dengan pengembangan industri pariwisata ini, citra atau slogan saja bukan jaminan tanpa mengikuti aturan atau regulasi yang telah dibuat oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta asosiasi pariwisata.<sup>17</sup>

Pemberian sertifikat halal misalnya seperti yang disampaikan Mimi Chairani, Kasi Pelayanan, Pembinaan, dan Pengawasan kepariwisataan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur, selama ini identik hanya untuk pelaku usaha restoran atau penyedia produk kuliner saja, sertifikat juga ditujukan untuk hotel, para pengelola hotel bukan hanya diminta untuk mensyaratkan tamu yang menginap di kamar yang sama merupakan pasangan yang halal, agar bisa mendapat sertifikat ini akan tetapi segala operasional hotel haruslah melalui proses yang halal, semisal proses ketersediaan air baik untuk dikonsumsi maupun keperluan yang lain mulai dari proses dari pengambilan dalam hal ini asal bahan baku air, proses penyaringan, hingga digunakan, semuanya harus mendapatkan sertifikasi halal, syarat ini juga berlaku untuk semua unit usaha atau layanan bagi para tamu mulai restoran, spa, hingga kolam renang.<sup>18</sup>

Demikian pula halal menurut Hayatul Ridha Kabid Kepariwisata. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bukan seperti yang dibayangkan secara umum oleh masyarakat luas, yakni hanya terkait makanan yang mengandung anjing ataupun babi saja. Tetapi juga meliputi kesadaran masyarakat untuk melahirkan budaya sertifikasi terhadap program, potensi, usaha, budaya bersih dan higienis serta pelayanan yang baik yang dapat langsung dirasakan oleh wisatawan dan kelengkapan sarana dan prasarana ibadah di berbagai tempat mulai dari warung kopi hingga ke tempat-tempat yang ramai dikunjungi lainnya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> B E Dartiningsih, *Komunikasi Pariwisata : Tinjauan Praktik Pariwisata Syariah Di Madura* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021).

<sup>18</sup> Wawancara dengan Mimi Chairani, pada senin tanggal 3 Agustus 2020, pukul 09.12 wib

<sup>19</sup> Wawancara dengan Hayatul Ridha, pada senin tanggal 3 Agustus 2020, pukul 14.12 wib

Hayatul Ridha mempersoalkan pemahaman masyarakat bukan hanya pelaku usaha yang terkait dengan pariwisata namun semua elemen masyarakat yang menurutnya masih memerlukan proses untuk memahami secara lebih utuh terkait dengan konsep pariwisata halal tersebut.

“Selama ini masyarakat cukup puas dengan label halal namun kenyataannya, banyak perilaku yang dianggap sepele ternyata belum mencerminkan perilaku halal yang sesuai dengan standar sertifikasi halal.”<sup>20</sup>

Kondisi ini semua tidak terlepas dari informasi yang diterima masyarakat, konsep pariwisata halal relatif baru di kenal di Aceh, istilah ini baru dipopulerkan di Aceh sekitar tahun 2016 seiring dengan peluncuran brand baru pariwisata Aceh.<sup>21</sup>

Menyiasati kondisi minimnya informasi serta rendahnya pemahaman terkait persoalan ini seperti yang dituturkan oleh Hayatul Ridha, Dinas pariwisata Aceh Timur melaksanakan berbagai terobosan terutama membuka saluran-saluran komunikasi dan informasi, berbagai kebijakan terkait dengan wisata halal disampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi.

“Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pariwisata halal ini kita bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata Indonesia melaksanakan pelatihan dan sosialisasi kepada pelaku usaha pariwisata dan tokoh masyarakat yang berada di sekitar destinasi wisata di hotel Royale Aceh Timur, beberapa waktu yang lalu”.<sup>22</sup>

Dinas Pariwisata Aceh Timur juga meluncurkan buku yang berisi penjelasan singkat berbagai destinasi wisata di Aceh Timur dan tata letaknya,<sup>23</sup> menurut Adi Dharma S.P ketua seksi pengembangan dan potensi objek wisata

---

<sup>20</sup> Ibid, Hayatul Ridha

<sup>21</sup> Pariwisata Aceh telah dikemas dalam sebuah branding baru, “The Light of Aceh” atau “Cahaya Aceh”. sebelumnya brand pariwisata Aceh ini adalah Visit Aceh. Visit Aceh sebagai Branding pariwisata Aceh sebelumnya dinilai sudah terlalu lama dan kurang memberi dampak yang signifikan terhadap dunia pariwisata di Aceh.

Branding baru ini merefleksikan semangat bagi seluruh masyarakat yang disatukan melalui Syariat Islam yang Rahmatan lil ‘alamiin, sebagai cahaya benderang yang mengajak pada nilai-nilai kebaikan, kemakmuran, dan memberikan manfaat serta kebaikan bagi semua pihak.

<sup>22</sup> Ibid, Hayatul Ridha

<sup>23</sup> Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur, *Travel Guide To East Aceh*, 1st ed., Trave Guide Indonesia (Aceh Timur: Pidii, 2019).



Aceh Timur, Peluncuran buku tersebut bertujuan untuk memudahkan wisatawan mendapat informasi berbagai destinasi wisata di Aceh Timur yang dapat dikunjungi sekaligus akomodasi untuk memudahkan para wisatawan tersebut, kehadiran buku tersebut bukan hanya ditujukan bagi para wisatawan semata namun juga kepada masyarakat yang ada di sekitar destinasi wisata sehingga mereka paham wilayah mereka akan menjadi pusat kunjungan wisatawan.<sup>24</sup>

Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata adalah pemilihan duta pariwisata Aceh Timur dengan melibatkan peserta dari kalangan pelajar dan Mahasiswa yang dilaksanakan setiap tahun, upaya ini sebagaimana yang dituturkan Hayatul Ridha akan memberikan umpan balik yang sangat positif bagi pemerintah. Pada satu sisi pemerintah diuntungkan dengan informasi yang tersebar luas melalui berbagai aplikasi media sosial yang sangat dikuasai oleh generasi milenial ini, mereka ketika nantinya telah terpilih sebagai duta wisata bukan hanya akan menjadi duta namun juga sebagai juru bicara untuk memperkenalkan destinasi wisata di Aceh Timur.

“Tentunya generasi milenial sekarang sangat akrab dengan media sosial, keberadaan mereka akan semakin memudahkan kita untuk bisa memperkenalkan destinasi wisata ke dunia luar melalui aplikasi di media sosial”.<sup>25</sup>

Penggunaan media sosial ini merupakan saluran informasi yang dibuka oleh Dinas Pariwisata Aceh timur untuk bisa menjangkau audien yang lebih luas dan beragam usia, keterlibatan mahasiswa dan pelajar merupakan pintu untuk masuk ke dalam saluran komunikasi tersebut. Pembukaan berbagai saluran komunikasi ini simultan dilaksanakan dengan pelibatan masyarakat dalam semua kegiatan pariwisata, upaya pelibatan masyarakat secara langsung ini menurut Surya Darma untuk meredam berbagai gejolak yang terjadi di masyarakat terutama di kalangan tokoh masyarakat dan para ulama, sebelum ini seperti dikatakan Surya Darma terjadi berbagai penolakan yang dimotori oleh para ulama setempat, mereka menilai pembukaan destinasi wisata akan mengundang perbuatan yang melanggar

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Adi Dharma S.P ketua seksi pengembangan dan potensi objek wisata dinas Pawisata kabupaten Aceh senin tanggal 3 Agustus 2020, pukul 13.10 wib.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Hayatul Ridha, pada senin tanggal 3 Agustus 2020, pukul 14.12 wib.

syariat Islam terutama destinasi wisata pantai, sikap penentangan yang ditunjukkan tersebut bukan hanya dalam bentuk non verbal namun telah melebar dalam bentuk aksi berupa pengusiran para wisatawan dari pantai.<sup>26</sup>

Mengatasi persoalan penolakan ini pihak Dinas Pariwisata Aceh Timur membuka komunikasi secara interpersonal yang dimotori oleh pimpinan dinas pariwisata Aceh Timur dan unit kerja lainnya, komunikasi dijalin dengan beberapa pimpinan dayah yang berada berdekatan dengan destinasi wisata seperti dayah Raudhatul ulum diniyah Islamiyah Al Aziziyah pimpinan Tgk M Thahir MD, dayah Asasul Islamiyah, yang dipimpin oleh Tgk Muhammad Yusuf, serta dayah Bustanul Huda Gampong Alue Cek Doi pimpinan Muhammad Ali Bin Tgk H Abdul Muthaleb.

Membangun relasi yang dilakukan dengan pimpinan dayah tersebut guna mencapai kesepahaman bagaimana pengelolaan tempat wisata yang sesuai dengan syariat Islam, tujuan yang paling penting tentunya tercipta *Relative Advantage* terhadap informasi yang diberikan sehingga proses inovasi dalam sektor pariwisata ini dapat tercapai. "Kita sadar bahwa pemahaman dan tafsir soal syariat Islam merupakan wilayah para ulama sehingga pemerintah Aceh Timur menggandeng para ulama untuk memberikan batasan bagaimana berperilaku di tempat umum khususnya bagi para wisatawan agar tidak melanggar syariat Islam".<sup>27</sup>

Pelibatan para ulama ini bukan hanya soal syariat Islam namun juga pada kesempatan yang sama mereka diberikan pemahaman soal pentingnya membangun pariwisata dan imbasnya kepada masyarakat terutama sektor ekonomi yang dapat mendongkrak pendapatan masyarakat. Diharapkan dengan pemahaman yang utuh yang telah didapat para ulama ini yang sekaligus sebagai pemuka masyarakat terkait pariwisata, seperti yang diharapkan Surya Darma nantinya dapat ditransfer kepada masyarakat atau jamaah, dalam berbagai bentuk dan forum yang mereka miliki seperti pengajian-pengajian rutin.

Implementasi dari sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi ditindaklanjuti dengan pelibatan masyarakat dalam pembinaan tempat-tempat wisata seperti di Kuala Leuge, Kuala Beukah, pantai

---

<sup>26</sup> Media Realitas, "Ratusan Santri Demo Sejumlah Pantai Wisata Di Aceh Timur."

<sup>27</sup> Ibid, Adi Dharma S.P

Kuala Parek, pantai Idi Cut dan pantai Keutapang Mameh. Masyarakat diajak menjadi pengelola atau operator tempat-tempat tersebut, masyarakat juga diajak untuk membangun fasilitas umum untuk kenyamanan pengunjung seperti tempat pemandian dan tempat shalat, dengan arahan para ulama mereka yang mempersiapkan peraturan-peraturan yang terkait dengan kunjungan ke tempat-tempat wisata seperti peraturan tidak boleh ada di pantai ketika adzan berkumandang dan tidak boleh bercampur antara pengunjung pria dan perempuan saat di mandi di laut.

“Kita berupaya melibatkan masyarakat dalam membangun pariwisata ini, konsep pelibatan masyarakat ini kita harapkan agar masyarakat lebih paham dengan wisata halal yang kita gagas, kita harapkan pelibatan ini akan menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat bagaimana mengelola dan berperilaku sebagaimana yang sesuai dengan standarisasi dari wisata halal”.<sup>28</sup>

Umpan balik yang paling diharapkan adalah terciptanya proses *compatibility* di masyarakat sehingga konsep wisata halal yang digagas pemerintah tersebut sejalan dan sesuai dengan apa yang telah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat selama ini, Surya Darma menyatakan informasi yang diberikan oleh para ulama membuat proses terciptanya *compatibility* dalam mengadopsi konsep wisata halal di tengah-tengah masyarakat dalam berjalan lebih efektif dan lebih cepat.

Pelibatan tersebut bukan berarti dinas pariwisata Aceh Timur berlepas tangan seperti yang dikatakan Surya Darma pihaknya kerap turun kelapangan untuk memantau dan berdialog dengan masyarakat untuk memberikan informasi beberapa regulasi terbaru yang terkait dengan pariwisata. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berupaya informasi yang disampaikan tidak melahirkan *complexity* dalam penerapannya di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh Surya Darma dan Hayatul Ridha pihaknya terus melakukan pendampingan dan sosialisasi dan membuka ruang-ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Hayatul Ridha, pada senin tanggal 3 Agustus 2020, pukul 14.12 wib.

Pemerintah berharap kendati lokasi wisata itu dikelola secara swakelola oleh masyarakat namun standarisasi dari pelayanan kepada para wisatawan dapat terus terjaga dengan demikian bukan hanya kunjungan Kembali para wisatawan yang diharapkan namun juga pengelolaan ini sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Pelibatan masyarakat sebagai operator secara tidak langsung juga mempekerjakan masyarakat di sekitar destinasi wisata sehingga dengan demikian pemerintah juga dapat mengurangi pengangguran di Aceh Timur, pemasukan dana dari parkir dan uang sewa tempat usaha akan masuk ke kas gampong dan pemuda setempat.

## **KESIMPULAN**

Peran komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh Timur melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Timur dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi menyampaikan kepada tokoh masyarakat dan pemuka agama serta masyarakat yang ada di sekitar destinasi wisata terkait dengan keberadaan kawasan wisata, mengusung konsep wisata halal yang merupakan konsep baru dalam khazanah pariwisata di Aceh, pemerintah Aceh timur ingin Kawasan wisata yang dimiliki bisa menjadi aset untuk pertumbuhan ekonomi.

Sosialisasi dan komunikasi interpersonal yang dibangun dengan tokoh masyarakat dan ulama memberikan efek yang baik pada penerimaan konsep pariwisata halal di Aceh Timur, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata merupakan terobosan lain yang dilakukan sehingga konsep wisata ini dapat mereka adopsi dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aceh, Antara. "Ratusan Santri Bubarkan Pengunjung Pantai Di Aceh Timur." 2019. <https://aceh.antaranews.com/berita/89314/ratusan-santri-bubarkan-pengunjung-pantai-di-aceh-timur>.
- Azda, M A. *Strategi Pemerintah Desa Pongkar Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun ....* repository.uin-suska.ac.id, 2020. <http://repository.uin-suska.ac.id/29147/>.
- BPS Kabupaten Aceh Timur. *Kabupaten Aceh Timur Dalam Angka 2020*. 1st ed. Aceh Timur: BPS Aceh Timur, 2020.

- Chanin, Oraphan, Piangpis Sriprasert, Hamzah Abd Rahman, and Mohd Sobri Don. "Guidelines on Halal Tourism Management in the Andaman Sea Coast of Thailand." *Journal of Economics, Business and Management* 3, no. 8 (2015): 791–94. <https://doi.org/10.7763/JOEBM.2015.V3.287>.
- Creswell, John W, Daliborka Luketić Sveučilište U Zadru, and Odjel Za Pedagogiju. "Research Desing: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (3 Rd Edition) (Nacrt Istraživanja: Kvalitativni, Kvantitativni i Mješoviti Pristupi)," n.d.
- Dartiningsih, B E. *Komunikasi Pariwisata : Tinjauan Praktik Pariwisata Syariah Di Madura*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=ytpVEAAAQBAJ>.
- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur. *Travel Guide To East Aceh*. 1st ed. Trave Guide Indonesia. Aceh Timur: Pidii, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=6WesDwAAQBAJ>.
- Febriani, Diah Lastri, and Reni Juliani. "Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Informasi Publik Di Kabupaten Aceh Barat." *AT-TANZIR: JURNAL ILMIAH PRODI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM*, June 29, 2022, 19–38. <https://doi.org/10.47498/tanzir.v13i1.970>.
- Gandes Dwi Ayuwangi, 14321015. "Analisis Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kotawaringin Timur Dalam Upaya Menjadikan Sampit Sebagai Kota Tujuan Pariwisata 2016-2021," January 2019.
- Huda, Miftahul, Muhammad Ulin Nuha, and Dewi Mashfufah. "Komunikasi Dakwah Kolaboratif Pemerintah Desa Melalui Kebijakan Publik." *AT-TANZIR: JURNAL ILMIAH PRODI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM*, July 26, 2021, 37. <https://doi.org/10.47498/tanzir.v12i1.521>.
- Kinnunen, Jussi. "Gabriel Tarde as a Founding Father of Innovation Diffusion Research." *Acta Sociologica* 39, no. 4 (1996): 431–42.
- Kuswandi, Aos. "STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT." *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 8, no. 2 (December 2020): 90–113. <https://doi.org/10.34010/AGREGASI.V8I2.3817>.
- Makkasau, Nurdalwah, Rosmini Maru, Syukri Nyompa, Jurusan Geografi, Fakultas Matematika, Dan Ilmu, and Pengetahuan Alam. "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Camba-Cambang Kabupaten Pangkep." *UNM Geographic Journal* 3, no. 2 (August 2021): 167–74. <https://doi.org/10.26858/UGJ.V3I2.22852>.
- Media Realitas. "Ratusan Santri Demo Sejumlah Pantai Wisata Di Aceh Timur." 2019. <https://mediarealitas.com/2019/07/ratusan-santri-demo-sejumlah-pantai-wisata-di-aceh-timur/>.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage publications, 2018.
- Pawito. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. II (2018). Yogyakarta: Lembaga Kajian

Islam dan Sosial (LKIS), 2007.  
[https://books.google.com/books/about/Penelitian\\_Komunikasi\\_Kualitatif.html?hl=id&id=zN5iDwAAQBAJ](https://books.google.com/books/about/Penelitian_Komunikasi_Kualitatif.html?hl=id&id=zN5iDwAAQBAJ).

Rachmawati, Anna. “Upaya India Untuk Menjadi Tujuan Pariwisata Medis Di Kawasan Asia Selatan Pada Pemerintahan Presiden Pranab Mukherjee (2012-2017),” 2020.

Wafah, M. *Redevelopment Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Drajat Lamongan Dengan Pendekatan Semiotika Tema Sapta Paweling*. digilib.uinsby.ac.id, 2019. <http://digilib.uinsby.ac.id/33252/>.